

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah usaha negara dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia yang mandiri, adil, sejahtera, dan untuk kemajuan sesuai dengan iman serta taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat bangsa baik itu meliputi bidang politik, ekonomi dan pertahanan keamanan. Dengan ruang lingkup yang besar, pembangunan nasional membutuhkan penanganan dari pemerintah selaku pemegang kebijakan serta peran dari seluruh lapisan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan nasional berbentuk kegiatan operasional, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Tujuan pembangunan nasional juga menuntut pembangunan manusia seutuhnya, mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan tingkat pemerintah daerah. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah pusat terhadap pembangunan nasional untuk kepentingan rakyat, maka pemerintah daerah harus mengelola, mendukung dan menunjang potensi manusia dan alam yang ada di seluruh daerah.

Pembangunan desa tidak terlepas dari peran kepala desa, kader desa dan tokoh penting masyarakat. Kepemimpinan dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi pembangunan suatu desa jika berjalan dengan baik, mampu mendorong bawahan dalam bekerja, dan mampu menjalin hubungan dengan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Perdesaan No. 6 Tahun

2014 untuk melaksanakan pembangunan, modus dan model yang dapat ditempuh adalah “membangun desa” dan “membangun desa”, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan nilai dan nilai hidup manusia. Mengentaskan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun infrastruktur, mengembangkan ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan dan pertumbuhan pemerintahan desa dengan memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai pemimpin, kepala desa harus membentuk pola pikir dan mentalitas masyarakat dalam hal membangun dan mengoptimalkan semangat pembangunan. Kepemimpinan lebih pada kualitas, yaitu memiliki kualitas kepada masyarakat dan keseimbangan antara kebutuhan dan pelayanan. Yang dapat dipahami sebagai kepemimpinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki arti yang luas. Memberikan pedoman bagi masyarakat untuk menghadapi lingkungan, memperkuat masyarakat, serta membentuk dan mengoptimalkan potensi desa yang ada.

Peran kepemimpinan kepala desa akan membentuk paradigma baru bagi desa di zaman modern seperti saat ini. Pernyataan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa kepala desa/desa adat atau orang dengan nama lain memegang peranan penting dalam statusnya sebagai perpanjangan tangan negara yang melayani masyarakat sebagai pemimpin masyarakat.

Kepemimpinan kepala desa dituntut untuk dapat mempengaruhi masyarakat agar masyarakat dapat peduli terhadap desa dan berpartisipasi dalam proyek. Pengaruh kepemimpinan kepala desa dapat membentuk perilaku dan pola pikir masyarakat dalam pembangunan desa. Namun melihat realita sekarang, pemimpin lebih mementingkan urusan pribadi daripada rakyat, sehingga rakyat malas untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tipe Kepemimpinan Kepala Desa Yan Teguh Wibowo dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Tipe kepemimpinan Kepala Desa Yan Teguh Wibowo dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

1. Keunggulan Teoritis

Diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan dari penelitian ini, khususnya di bidang ilmu pemerintahan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah desa dapat mewakili dan mengarahkan masukan gagasan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam melaksanakan rencana pembangunan desa.
 - b. Diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan bagi penanggung jawab masalah pembangunan di tingkat desa.

E. Landasan Teori

Pada landasan teori ini ada beberapa definisi mengenai hasil penelitian. Berikut definisi hasil penelitian yaitu:

1. Pengertian Kepemimpinan

Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan mempengaruhi masyarakatnya. Sesuai dengan apa yang disampaikan Kartono (2011:57) pengertian kepemimpinan adalah kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain supaya ikut bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang itu untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Pengertian kepemimpinan dalam buku Gary Yuki menurut House adalah kemampuan individu untuk memberikan pengaruh, motivasi, dan membuat orang lain agar mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi.

Pemimpin dapat berdampak pada masyarakat. Menurut Sedarmayanti (2007:111), kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Seorang pemimpin yang sukses adalah orang yang dapat mempengaruhi pengikutnya. Oleh karena itu, kepemimpinan juga berarti kemampuan seseorang yang mampu mempengaruhi individu atau kelompok untuk memahami, menyadari, dan dengan sepenuh hati mengikuti kehendak pemimpin.

Kepemimpinan juga dapat memainkan peran manajemen, yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan tampaknya terdorong untuk merespon berbagai bentuk faktor seperti tantangan, kekuasaan, perubahan dan konteks organisasi. Sebaliknya, kepemimpinan dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam suatu organisasi.

Kepemimpinan memiliki konotasi yang luas, meliputi proses mempengaruhi dan menetapkan tujuan organisasi, memotivasi perilaku anggota untuk mencapai tujuan, mempengaruhi kelompok dan memperbaiki budaya. Selain itu, dapat mempengaruhi interpretasi anggotanya terhadap peristiwa, mengatur kegiatan untuk mencapai tujuan, menjaga kerjasama dan hubungan kelompok, dan memperoleh dukungan kolaboratif di dalam dan di luar kelompok atau organisasi.

2. Tipe Kepemimpinan Kepala Desa

Menurut Zaini Mustakim (2015:11) tipe kepemimpinan kepala desa dibagi menjadi tiga tipe, yaitu;

a. Kepemimpinan Regresif

Kepemimpinan retrogresif mengacu pada kepemimpinan yang bersifat otoriter. Secara teori, otokrasi mengacu pada pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh satu orang. Fitur-fitur seperti restrukturisasi desa yang anti dalam pemerintahan baru seperti komite desa dan kekuatan ekonomi tingkat desa pasti tidak akan diloloskan. Desa paroki (hidup menurut keturunan, agama, suku atau alasan lain) dan desa korporatis (mengikuti pedoman dan peraturan pemerintah).

b. Kepemimpinan Konservatif-Inovatif

Kepemimpinan Konservatif-Inovatif tipe kepemimpinan ini adalah tipe yang dapat diidentifikasi dengan adanya kepala desa yang melakukan tugasnya (seharusnya) dan menggunakan kekuasaan dan kekayaan semauanya, bukan untuk demokratisasi dan membahagiakan rakyat. Kepemimpinan konservatif-inovatif pada dasarnya mengikuti tugas pokok dan fungsi kepala desa, menjalankan perintah atasan, dan melaksanakan tugas kepala desa secara bertahap.

c. Kepemimpinan Inovatif-Progresif

Kepemimpinan Inovasi dan Kemajuan Inovasi-kepemimpinan progresif dapat diidentifikasi dengan adanya sense of power yang harus dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat luas. Tipe kepemimpinan ini tidak resisten terhadap perubahan, memberikan ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan masyarakat, transparan dan akuntabel. Melalui model ini, kepala desa lebih dipercaya oleh masyarakat desa.

Aspek yang menjadi dasar pelaksanaan kepemimpinan desa adalah legitimasi, yang erat kaitannya dengan prestise, kepercayaan, dan klaim kekuasaan. Legitimasi erat kaitannya dengan bagaimana orang memperlakukan kekuasaan. Kekuasaan untuk memerintah, menjadi pemimpin, menjadi wakil atau wakil dari suatu masyarakat. Setiap pemimpin mempunyai karakter atau ciri khas dalam memberikan pengaruh kepada bawahannya.

Tipe atau gaya kepemimpinan menurut Mulyadi (2015:150) dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Tipe kepemimpinan otokratis

Tipe kepemimpinan ini berpusat pada seorang pemimpin yang menentukan kebijakan di segala aktivitas, bawahan hanya sebagai pelaksana dengan arahan langsung dari pimpinan sehingga menyebabkan bawahan menjadi pasif.

b. Tipe kepemimpinan demokratis

Tipe kepemimpinan demokratis adalah tipe kepemimpinan dimana pemimpin mengutamakan diskusi kelompok dalam pengambilan keputusan, pemimpin menghargai setiap pendapat dari bawahan atau anggota dan pemimpin memberikan alternatif prosedur jika terjadi hambatan dalam pelaksanaan pengambilan kebijakan.

c. Tipe kepemimpinan kebebasan (*laissez faire*)

Tipe kepemimpinan ini memberikan kebebasan penuh kepada bawahan dengan partisipasi yang sangat minim dari pimpinan, sehingga pemimpin hanya dapat menempatkan dirinya sebagai pengawas tanpa adanya aturan dalam pengambilan kebijakan.

3. Fungsi Kepemimpinan

Menurut Rivai (2005:53), kepemimpinan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

a. Fungsi Intruksi

Fungsi pernyataan adalah fungsi komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai penyampai pesan adalah orang yang memutuskan apa, bagaimana, dimana dan dimana melaksanakan perintah untuk mengambil keputusan. Pada dasarnya kepemimpinan yang efektif memerlukan keterampilan memotivasi dan mendorong orang lain untuk melaksanakan perintah guna mencapai tujuan.

b. Fungsi Konsultasi

Fungsi konsultasi lebih merupakan komunikasi dua arah. Artinya menerima masukan berupa umpan balik untuk perbaikan dan penyelesaian keputusan yang dibuat dan dilaksanakan bersama. Hal ini diharapkan dapat melaksanakan keputusan yang dibuat oleh pemimpin atas kesepakatan bersama,

memungkinkan pemimpin memberikan perintah kepada anggotanya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien.

c. Fungsi Partisipasi

Fungsi partisipasi dalam peran ini, pemimpin berusaha melibatkan anggotanya dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Fungsi ini tidak berarti bahwa pemimpin dapat melakukan apapun yang diinginkannya, tetapi harus dapat mengontrol dan mengarahkan anggotanya agar tidak mengganggu pekerjaan utama orang lain..

d. Fungsi Delegasi

Fungsi delegasi didefinisikan sebagai pendelegasian wewenang untuk membuat dan melaksanakan keputusan, baik dengan atau tanpa persetujuan pimpinan. Mereka yang menjadi tuan rumah delegasi ditunjuk sebagai asisten pemimpin yang memiliki kesamaan dalam konsep, prinsip, dan ambisi.

e. Fungsi Pengendalian

Fungsi kontrol menyiratkan bahwa seorang pemimpin yang efektif mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan atau aktivitas anggotanya dengan cara yang berorientasi pada tujuan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan bersama.

4. Pengertian Kepala Desa

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa kepala desa adat/desa adat atau sebaliknya adalah kepala desa/desa adat yang memimpin pemerintahan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa atau pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun sejak tanggal dilantik, dan dapat menjabat paling banyak tiga periode berturut-turut, dan dapat juga dipilih kembali untuk tiga periode berturut-turut.

Kepala desa didukung oleh kader desa yang terdiri dari sekretariat desa, pengurus daerah dan pengawas teknis dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan tugasnya komite desa bertanggung jawab penuh kepada kepala desa.

5. Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa kepala desa adat/desa adat atau sebaliknya adalah kepala desa/desa adat yang memimpin pemerintahan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa atau pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun sejak tanggal dilantik, dan dapat menjabat paling banyak tiga periode berturut-turut, dan dapat juga dipilih kembali untuk tiga periode berturut-turut.

Kepala desa didukung oleh kader desa yang terdiri dari sekretariat desa, pengurus daerah dan pengawas teknis dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan tugasnya komite desa bertanggung jawab penuh kepada kepala desa.

6. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat sangat beragam dan beraneka macam. Menurut Huraerah (2008:102) bentuk partisipasi masyarakat memiliki beberapa bentuk yaitu sebagai berikut:

a. Partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide

Melalui pelibatan ini, komunitas mengkomunikasikan pemikiran dan gagasan dalam pertemuan atau pertemuan.

b. Partisipasi dalam bentuk materil

Partisipasi ini berupa properti yang ditampilkan oleh masyarakat pada pertemuan atau pertemuan dan selama pelaksanaan proyek pembangunan.

c. Partisipasi dalam bentuk tenaga

Partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk kerja masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan pembangunan desa.

7. Pengertian Pembangunan Desa

Menurut Marbun (2008: 38), pembangunan desa tersebut merupakan upaya pembangunan masyarakat pada tingkat pemerintahan yang paling rendah dan harus dilaksanakan dan dikelola secara terus menerus dan sistematis sebagai satu kesatuan pembangunan daerah dan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 2 disebutkan : “Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mempersatukan negara Pancasila, menyelenggarakan pemerintahan desa, menyelenggarakan pembangunan desa, membina masyarakat desa dan memperkuat masyarakat desa Republik Indonesia. Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika”.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 83 mengatur tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan yang meliputi;

1. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan gabungan dari pembangunan multi desa dalam satu (satu) kabupaten/kota.
2. Pembangunan perdesaan adalah tentang percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
3. Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. Penggunaan dan penggunaan kawasan desa dalam lingkup lahan konstruksi ditetapkan dengan rencana nasional/rencana tata ruang kota;
 - b. Pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan;
 - c. Mengembangkan infrastruktur, meningkatkan ekonomi pedesaan dan mengembangkan teknologi tepat guna; dan
 - d. Memperkuat masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap layanan dan kegiatan ekonomi.
4. Perencanaan pembangunan perdesaan dibahas bersama oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
5. Rencana pembangunan tata ruang perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

F. Metode Penelitian

Berikut penjelasan mengenai metode penelitian yang penulis teliti:

1. Jenis Penelitian

Mengenai judul yang diajukan yaitu “Tipe Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa”, jenis

penelitian yang digunakan adalah survei deskriptif kualitatif. Menurut John W. Creswell (2013:20), penelitian kualitatif adalah suatu strategi penelitian dimana seorang peneliti mempelajari dengan seksama suatu rencana, kegiatan, peristiwa, proses atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif dapat mencapai tataran penulisan yaitu penelitian deskriptif. Peneliti hanya menggambarkan keadaan suatu objek atau peristiwa tanpa membuat kesimpulan umum. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena peneliti menjawab pertanyaan yang membutuhkan informasi mendalam dari informan yang memahami tipe kepemimpinan kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Ngale. Kedepan peneliti dapat dengan mudah menyimpulkan gaya kepemimpinan apa yang digunakan kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Menurut Moleong (2007:6), meskipun bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, bukan angka. Pendekatan deskriptif dipilih karena memudahkan peneliti untuk mendeskripsikan masalah dari topik yang diteliti secara mendalam.

2. Fokus Penelitian

Fokus masalah dalam penelitian kualitatif mengandung inti masalah dan memiliki batasan masalah secara umum. Mengidentifikasi fokus suatu pertanyaan dalam penelitian kualitatif penting karena dimaksudkan untuk memberikan batasan penelitian dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan observasi atau penelitian. Pemilihan fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian kualitatif sehingga peneliti dapat membatasi pemilihan data yang relevan. Menurut Meoleong (2014:94), prioritas penelitian ditentukan dengan dua cara (tujuan dan sasaran), yaitu:

- a. Penelitian limitasi, yang menitikberatkan pada keterbatasan bidang teori. Jika kita terbatas untuk mengidentifikasi teori dari bawah ke atas, kita tidak akan menggunakan bidang studi utama lainnya.
- b. Memenuhi standar untuk masukan dan keluaran informasi yang diterima di lokasi. Dengan arah dan bimbingan fokus, peneliti dapat mengambil kembali data apa, data apa yang dapat dikumpulkan, dan data mana yang menarik tetapi tidak relevan, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam data yang dikumpulkan.

Jadi memiliki fokus yang jelas dan ringkas memudahkan untuk memutuskan data mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Tempat penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat mengamati dan memperoleh data penelitian untuk suatu masalah atau fenomena yang sedang dibutuhkan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terekam di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Lokasi penelitian dipilih karena adanya peningkatan pembangunan di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Seiring perkembangan yang meningkat, peneliti melihat ke lokasi untuk mengetahui sejauh mana kepemimpinan kepala desa diimplementasikan dalam pembangunan desa di desa Ngale.

4. Sumber dan Jenis Data

Data membutuhkan informan atau narasumber. Menurut Lexy Moleong (2008:132), informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan dan kondisi lingkungan penelitian. Penggunaan whistleblower untuk peneliti relatif jarang, karena whistleblower digunakan untuk bercakap-cakap, bertukar pendapat, atau membandingkan kejadian yang ditemukan oleh subjek lain.

Sugiyono (2013:81) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari ukuran dan karakteristik populasi. Ketika populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data atau informasi dengan cara membaca, mengutip dan menyusun sesuai dengan data yang diperoleh. Pada saat penulisan penelitian ini, data yang diperoleh peneliti berasal dari data asli. Sumber data primer adalah sumber data yang menyediakan data secara langsung kepada pengumpul data. Dalam hal ini, penulis memperoleh data secara langsung dari responden atau subjek penelitian. Sumber data berasal dari wawancara dengan masyarakat, perangkat desa dan tokoh masyarakat di Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

Efendi dan Tukiran (2012:07) mengemukakan bahwa wawancara merupakan proses yang interaktif dan komunikatif. Hasil wawancara tergantung pada beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik penelitian yang dimasukkan dalam kuesioner dan keadaan wawancara.

5. Teknik Analisi Data

Miles dan Huberman (2012:246) merekomendasikan agar kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga tuntas untuk menjenuhkan data. Langkah-langkah analisis data adalah:

a. Data reduction (mereduksi data)

Reduksi data (Data reduction) Reduksi data berarti meringkas apa yang paling penting, memfokuskan pada apa yang penting, mencari tema dan pola, menjadikan data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pencarian data lebih lanjut bila diperlukan. Reduksi data adalah keadaan pikiran sensitif yang membutuhkan keluasan, kecerdasan, dan kedalaman wawasan.

b. Data display (penyajian data)

Data display (penyajian data) Dalam penelitian kualitatif, data sering disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, grafik, hubungan antar kategori, flowchart, dll. Teks naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Menyajikan data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

c. Conclution drawing (penarikan kesimpulan)

Sampai pada suatu kesimpulan (Conclution drawing) Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari analisis data. Langkah ketiga dilakukan untuk menemukan sesuatu yang lebih akurat dari jawaban dan pernyataan yang diterima secara umum dan menyeluruh dalam kaitannya dengan pertanyaan yang diamati.